

**EMPOWERING PEOPLE TO SERVE AND TO HEAL:  
GEREJA SEBAGAI KOMUNITAS IMAN INKLUSIF DALAM  
MEMBERDAYAKAN PENYANDANG DISABILITAS**

**Heri Purwanto\***

*Abstract*

This paper is an attempt to discuss the issue of disability and the vulnerability of persons with disabilities in the midst of a culture of normalcy. The normal life in society has framed the order of human life by presenting all the consequences for persons with disabilities. Normality views persons with disabilities as a form of “disability,” “abnormality” and “imperfection” in human beings. Normality also places persons with disabilities as objects, not subjects. As a result, people with disabilities are often eliminated, discriminated against, and marginalized for their perceived “abnormality” in a society that glorifies normality. The solidarity model is an alternative as a counter-attack to normalcy. Likewise with the role and responsibility of the church towards persons with disabilities. In the midst of its imperfections, the church needs to have solidarity with people with disabilities as with God who has solidarity with the world who was incarnated in Jesus with a body full of wounds and “disability” after His resurrection. Therefore, this paper seeks to present an ecclesiological view of the church as a faith community that is inclusive, liberates, and at the same time empowers persons with disabilities in the midst of normalcy.

*Keywords:* disability, normality, solidarity, ecclesiology, community, inclusive.

*Abstrak*

Makalah ini merupakan sebuah upaya untuk membahas isu disabilitas dan kerentanan para penyandang disabilitas di tengah budaya kenormalan.

---

\* Mahasiswa Magister Divinity Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.

Kenormalan yang hidup di dalam masyarakat telah membingkai tatanan kehidupan manusia dengan menghadirkan segala konsekuensinya terhadap para penyandang disabilitas. Kenormalan memandang para penyandang disabilitas sebagai bentuk “kecacatan,” “ketidaknormalan” dan “ketidaksempurnaan” dalam diri manusia. Kenormalan juga menempatkan para penyandang disabilitas sebagai obyek, bukan subyek. Dampaknya, para penyandang disabilitas seringkali tereliminasi, terdiskriminasi, dan terpinggirkan atas anggapan “keabnormalan” mereka di dalam tatanan masyarakat yang mengagungkan kenormalan. Model solidaritas menjadi salah satu alternatif sebagai counter-attack atas kenormalan. Demikian juga dengan peran dan tanggung jawab gereja terhadap para penyandang disabilitas. Di tengah ketidaksempurnaannya, gereja perlu untuk memiliki solidaritas terhadap para penyandang disabilitas sebagaimana dengan Allah yang memiliki solidaritas terhadap dunia yang berinkarnasi di dalam diri Yesus dengan tubuh yang penuh luka dan “kecacatan” setelah kebangkitannya. Oleh karena itu, makalah ini berupaya untuk menyajikan pandangan eklesiologi gereja sebagai komunitas iman yang inklusif, membebaskan dan sekaligus memberdayakan para penyandang disabilitas di tengah kenormalan.

*Kata-kata kunci:* disabilitas, kenormalan, solidaritas, eklesiologi, komunitas, inklusif.

## PENDAHULUAN

*“I met Shaun Murphy when he was fourteen years old. I was living in Wyoming at that time. He was, and still is an extraordinary young man. Yes, he has autism, but also he has savant syndrome. Genius level skill in several areas. He has almost perfectly recall. He has special intelligent. And he sees things and analyzing thing in the way that, that just are remarkable. And way that we can't even begin to understand. Those are asset. Undeniable asset for any doctor, particularly surgeon.”*

[Saya bertemu Shaun Murphy saat dia berumur 14 tahun. Saya tinggal di Wyoming saat itu. Ia dulu, dan masih, lelaki muda yang

luar biasa. Ya, ia punya autisme, tapi ia juga punya savant syndrome. Keahlian tingkat jenius di beberapa area. Ia punya ingatan yang nyaris sempurna. Ia punya kecerdasan spasial. Dan ia melihat sesuatu dan menganalisa sesuatu dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang kita bahkan tak bisa mulai memahami. Itu adalah asset. Aset yang tak terbantahkan untuk dokter manapun, terutama ahli bedah.]

Sepenggal percakapan di atas terdapat pada episode pertama dalam serial televisi drama medis Amerika Serikat, *The Good Doctor*, yang diproduksi oleh David Shore. Adegan percakapan tersebut disampaikan oleh Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff) dalam rapat khusus dewan direksi Rumah Sakit San Jose St. Bonaventura sebagai pembelaannya terhadap Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) dalam proses perekrutannya untuk menjadi salah satu dokter bedah di rumah sakit tersebut. Proses perekrutan Dr. Shaun Murphy di rumah sakit tersebut menuai protes keras dari segenap direksi dan juga dokter-dokter bedah lainnya. Dr. Marcus Andrew (Hill Harper) adalah salah satunya yang mempertanyakan kemampuan Dr. Shaun Murphy sebagai dokter bedah dengan autisme, khususnya perihal dalam berkomunikasi: *“A surgeon needs to communicate. Not just for information, but sympathy, empathy. Can Dr. Murphy do that? [Seorang dokter bedah harus berkomunikasi. Tidak hanya sekedar informasi, tetapi simpati, empati. Dapatkah Dr. Murphy melakukan itu?] Demi diterima dan diberinya kesempatan bagi Dr. Shaun Murphy sebagai dokter bedah di rumah sakit tersebut, Dr. Aaron Glassman rela meletakkan jabatannya sebagai jaminannya apabila Dr. Shaun Murphy melakukan kesalahan dalam pekerjaannya sebagai dokter bedah. Singkat cerita, dalam perjalannya Dr. Shaun Murphy dapat menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik sebagai dokter bedah, meskipun pada awalnya ia seringkali mendapat penolakan dan perlakuan tidak menyenangkan dari kepala departemen bedah, Dr. Neil Melendez (Nicholas Gonzalez). Pada akhirnya, tumbuhlah pengakuan kepada Dr. Shaun Murphy sebagai dokter bedah yang hebat dari rekan-rekan kerjanya atas kinerja, kecakapan, dan keahlian yang dilakukannya dalam setiap penanganan pembedahan pasien-pasien di ruang operasi. Pengakuan itu bukan hanya dari pihak yang selama itu mendukungnya dari awal, Dr.*

Aaron Glassman, tetapi juga dari orang-orang yang pernah menolaknya sebagai dokter bedah karena disabilitas (autisme) yang ada di dalam dirinya. Dr. Shaun Murphy bukan hanya mendapat pengakuan atas kemampuannya, tetapi ia juga mendapat penerimaan seutuhnya atas disabilitas yang dimilikinya dalam komunitas rumah sakit itu.

Dalam serial televisi drama tersebut, Dr. Shaun Murphy adalah seorang dokter bedah dengan autisme dan syndrome savant. Pada masa kecilnya ia mendapat perlakuan kekerasan dan tidak menyenangkan lainnya dari orang-orang di sekitarnya, baik dari orang tuanya maupun juga teman-teman sekolahnya. Hanya Steve Murphy (Dylan Kingwell), adik laki-lakinya yang menjadi sahabat satu-satunya. Hingga pada saat kelincinya sekarat dan akhirnya mati oleh karena perbuatan ayah mereka, mereka menemui Dr. Glassman untuk menolong kelincinya. Kematian kelincinya itu, dan terlebih lagi Steve Murphy di depan matanya sendiri, memotivasinya untuk studi kedokteran dan menjadi ahli bedah. Dengan mentoring dan persahabatannya dengan Dr. Glassman, akhirnya ia menjadi dokter bedah di rumah sakit San Jose St. Bonaventura. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter bedah dengan autisme, banyak tantangan yang dihadapi, baik dari internal dirinya sendiri maupun juga dari eksternal. Mentoring dan persahabatannya dengan Dr. Glassman serta juga penerimaan dari rekan-rekan dokter lainnya menjadikan rumah sakit San Jose St. Bonaventura sebagai rumah dan juga komunitas baru bagi Dr. Shaun Murphy dengan disabilitas untuk terus berkembang dan berkarya sebagai dokter bedah. Rumah sakit San Jose St. Bonaventura menjadi komunitas baru bagi Dr. Shaun Murphy dengan disabilitas yang dimilikinya. Komunitasnya yang inklusif itu memberikan kesempatan bagi dirinya untuk membangun relasi dengan rekan-rekan kerjanya dan juga mengasah kemampuan berkomunikasi, sekaligus juga memberdayakannya dirinya, sebagai dokter bedah.

Seperti halnya Shaun Murphy, sebagian besar masyarakat yang menyandang disabilitas seringkali mendapatkan penolakan dan kurang mendapat penerimaan dari masyarakat atas keberadaan mereka dengan disabilitas yang dimilikinya. Mereka seringkali ditolak, diacuhkan, bahkan disingkirkan, bukan dari orang-orang yang tidak memiliki relasi dengannya, tetapi justru dari orang-orang yang berelasi sangat dekat dengannya, bahkan keluarganya sendiri. Mereka seringkali dipandang sebagai manusia yang

aneh, “cacat”, “*abnormal*”, berbeda dari yang lain, tidak berguna dan selalu menyusahkan orang lain, bahkan dianggap sebagai aib bagi keluarga. Lebih parah lagi, masih ada kepercayaan yang hidup di dalam masyarakat yang menganggap bahwa disabilitas yang ada di dalam diri seseorang merupakan dosa, karma dan juga kutukan atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan oleh orang tua atau nenek moyangnya di masa lalu. Akibatnya, mereka yang memiliki disabilitas mental atau gangguan kejiwaan, sebagai salah satu contohnya adalah skizofrenia, seringkali mendapat perlakuan yang tidak layak dan disertai dengan unsur kekerasan. Tidak jarang mereka yang memiliki disabilitas ini seringkali dikurung dan dipasung serta diperlakukan tidak layak oleh keluarganya karena tekanan dari masyarakat sekitar. Oleh karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dari sebagian masyarakat, orang dengan skizofrenia seringkali dilabeli sebagai orang yang kurang waras, gila bahkan dirasuk oleh roh jahat atau setan. Padahal mereka tetap memerlukan penerimaan atas disabilitas yang dimilikinya dan juga pengobatan rutin untuk proses kesembuhan dan pemulihannya.

Penolakan dan kurangnya penerimaan, bahkan tindakan pengucilan yang dirasakan dan dialami oleh para penyandang disabilitas justru semakin membuat kehidupan mereka terdiskriminasi, terpinggirkan dan tidak berdaya. Tambah lagi, stereotip atau stigma yang hidup dalam masyarakat terhadap para penyandang disabilitas yang selalu dikaitkan dengan permasalahan moral. Demikian juga faktor budaya dan pandangan sosial yang semakin mendiskriminasi mereka dari lingkungan sosialnya. Pada akhirnya, mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberdayakan diri mereka di tengah segala keterbatasan yang dimilikinya. Tidak ada akses untuk masuk, apalagi membuka ruang-ruang yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, sehingga dapat diyakini bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.<sup>1</sup> Atas alasan dan pertimbangan tersebut, negara dan pemerintah, serta masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan atas hak-hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa ada diskriminasi.

Bagaimana dengan sikap gereja terhadap isu disabilitas dan para penyandang disabilitas? Bahwa ada dinding yang tebal dan tinggi yang memisahkan para penyandang disabilitas dari orang-orang yang bukan penyandang disabilitas.<sup>2</sup> Gereja dipanggil untuk meruntuhkan dinding-dinding: rasa malu, prasangka, kebencian, persaingan, ketakutan, ketidaktahuan, prasangka teologis dan kesalahpahaman budaya yang selama ini membatasi dan menghimpit para penyandang disabilitas. Gereja juga dipanggil untuk menjadi komunitas yang inklusif untuk meruntuhkan tembok-tembok tersebut, yakni sebagai wujud tanggung-jawab kemanusiaan dan pembebasan, seperti yang dilakukan oleh Kristus. Di sini gereja diharapkan untuk turut berjuang dalam pelayanan yang terbaik untuk, kepada dan dengan para penyandang disabilitas.<sup>3</sup> Satu bentuk konkrit yang perlu dilakukan oleh gereja sebagai komunitas yang inklusif dalam tanggung-jawab pelayanan kemanusiaannya bagi para penyandang disabilitas dalam gerakan ekumenis ini adalah melalui pelayanan dan pemberdayaan bagi terhadap. Gereja sebagai agen pembebas diharapkan untuk melepaskan segala jeratan dan kekangan yang menstigma dan mendiskriminasi kehidupan dan penghidupan para penyandang disabilitas. Gereja juga diupayakan membangun relasi-relasi dan menciptakan komunitas-komunitas yang sehat sebagai usaha menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi manusia seutuhnya dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama dan lingkungannya.

## **DI ANTARA “KENORMALAN” DAN “KESEMPURNAAN”**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup> Dalam hal ini yang perlu dipahami dari keterbatasan, baik itu secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang ada dalam diri penyandang disabilitas adalah bukan hanya yang adalah bawaan sejak lahir saja, tetapi juga diakibatkan karena faktor sakit atas penyakit tertentu yang diderita, kecelakaan, bencana alam dan sosial hingga pada kondisi tubuh yang lemah karena faktor usia. Mereka yang memiliki

kondisi keterbatasan dalam diri mereka oleh karena faktor-faktor tersebut, juga termasuk sebagai para penyandang disabilitas. Atas keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam diri penyandang disabilitas itu, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.<sup>5</sup> Selain itu, perihal jaminan dan perlindungan bagi para penyandang disabilitas terdapat juga dalam tujuan dan prinsip konvensi UNCRPD (*The United Nations Convention on the Right of Persons with Disabilities*), yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas. Dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Sedangkan prinsip-prinsipnya adalah untuk melindungi dan memperhatikan para penyandang disabilitas dengan mengakui: Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan; non diskriminasi; partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.<sup>6</sup> Ini merupakan satu bentuk penerapan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan juga dunia internasional untuk memperhatikan dan tentunya juga memberikan wadah bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan perlindungan dan juga hak-hak para penyandang disabilitas menyangkut kehidupan dan penghidupan mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara yang konkrit bagi para penyandang disabilitas untuk dapat mengakses dan memperoleh pemenuhan hak-hak kehidupan penyandang disabilitas, seperti halnya pendidikan, kesehatan, ekonomi,

politik, budaya, hingga dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan kerja dan pemberian kesempatan bekerja dan berwirausaha yang sama dengan mereka yang bukan disabilitas akan sangat mendukung para penyandang disabilitas dalam kemandirian secara ekonomi. Lebih dari itu, segala kebijakan tersebut semestinya juga mampu untuk mengurangi dan menghilangkan segala perlakuan ketidakadilan dan diskriminasi sosial terhadap para penyandang disabilitas. Sebaliknya, kebijakan itu mendukung para penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan kehidupan dan penghidupan mereka sebagai manusia yang bermartabat sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Bahwa segala bentuk kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan, baik oleh negara maupun dunia internasional adalah baik adanya guna memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan dan penghidupan bagi para penyandang disabilitas. Namun, seringkali yang terjadi bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak terimplementasi dengan sebagaimana mestinya. Dalam pengamatan saya, tidak banyak tersedia fasilitas-fasilitas umum yang disediakan khusus bagi para penyandang disabilitas yang disediakan oleh negara di tempat-tempat umum di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai contohnya adalah jalur pemandu khusus bagi para penyandang disabilitas tunanetra, toilet umum khusus penyandang disabilitas, perpustakaan khusus penyandang disabilitas tunanetra, *lift* khusus penyandang disabilitas di perkantoran dan Lembaga pemerintahan, transportasi umum yang ramah bagi penyandang, baik bus maupun taksi, dan sarana-prasarana lainnya. Selain terbatasnya sarana dan prasarana sebagai fasilitas umum negara khusus bagi para penyandang disabilitas, ternyata masih ada juga pegawai dari perusahaan daerah atau kota sebagai sumber daya manusia negara yang tidak bersikap ramah dan tidak memiliki kepedulian terhadap para penyandang disabilitas. Satu pengalaman saya yang tidak terlupakan dalam benak saya adalah ketika naik transportasi umum di kota Semarang, yakni Bus Trans Semarang, yakni dari terminal Terboyo menuju ke daerah Peterongan. Ketika bus ini berhenti di salah satu halte, ada penyandang disabilitas, yakni lumpuh, bermaksud untuk naik bus Trans Semarang, tetapi dilarang oleh kernetnya. Padahal bus Trans Semarang yang saya naiki itu tidak banyak penumpang. Saya bertanya: “Kenapa calon penumpang dengan penyandang disabilitas tadi dilarang naik



oleh kernet bus?” Tidak ada jawaban. Apakah karena arsitektur halte yang tidak tepat? Saya melihat konstruksi halte memang kurang tinggi? Jadi, kekuatirannya adalah calon penumpang dengan disabilitas itu akan kesulitan naik. Kalaupun memang sulit untuk naik, mengapa kernet bus tersebut tidak mau membantu untuk menaikkan calon penumpang dengan disabilitas, tapi yang terjadi adalah sebaliknya, yakni melarangnya untuk naik bus? Respon yang saya dengar dari kernet bus itu: “Naik angkot saja!” Dan bus meninggalkan calon penumpang dengan disabilitas tersebut. Padahal bus Trans Semarang ini adalah milik perusahaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Semarang, sebagai ibukota Jawa Tengah. Saya merasa sangat kecewa dan marah atas kejadian tersebut, apalagi calon penumpang disabilitas yang telah menerima penolakan dari kernet bus Trans Semarang. Ini adalah salah satu bukti konkrit bahwa kebijakan-kebijakan oleh negara itu tidak terimplementasi dengan benar, baik dari sisi sarana dan prasarana yang mana memang masih sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan sangat kurang sekali ketersediaannya bagi para penyandang disabilitas pada saat ini. Tambah lagi, kualitas sumber daya manusia terkait yang masih sangat rendah akan kesadaran dan kepeduliannya terhadap para penyandang disabilitas. Untuk itu, para pemangku kebijakan baik eksekutif, legislatif dan juga yudikatif perlu bekerjasama untuk pengawasan dan penerapan dari kebijakan-kebijakan yang telah ada bagi para penyandang disabilitas.

Di luar dari kebijakan-kebijakan negara tersebut, dan juga para stakeholder terkait, saya berpendapat bahwa ada faktor lain yang jauh lebih membahayakan bagi para penyandang disabilitas, yakni stigma atau stereotip negatif terhadap para penyandang disabilitas yang telah hidup dan mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat. Terhadap para penyandang disabilitas, stigma dan stereotip ini seringkali memandang dan melabeli mereka sebagai manusia yang “cacat”, *abnormal*, tidak berguna dan menyusahkan orang lain, serta sebagai aib bagi keluarga dan juga masyarakat. Stigma dan stereotip negatif ini tetap hidup di dalam masyarakat karena ideologi “kenormalan” dan “kesempurnaan” atas tubuh manusia. Tambah lagi, pandangan atas “kecacatan” dan “kenormalan” itu merupakan sebuah fenomena konstruksi sosial yang dibangun oleh pihak dominan dalam suatu tatanan masyarakat tertentu. Demikian pernyataan Yusak B. Setyawan atas kenormalan sebagai fenomena konstruksi sosial oleh pihak dominan:

“Pihak yang dominan mengukuhkan suatu ideologi, yakni ideologi kenormalan (*normalcy*), dengan substansi penjunjung-tinggian manusia-manusia yang tidak “bercacat,” yang pada saat yang bersamaan mereka yang dianggap tidak masuk dalam kategori “kenormalan” dimarginalisasikan, didiskriminasi dan diabaikan secara psikologis, ekonomis, budaya, politik dan arsitektural.”<sup>7</sup>

Ideologi kenormalan sebagai fenomena konstruksi sosial yang telah terbangun di dalam kehidupan masyarakat ini sebenarnya juga sangat terpengaruh oleh pemikiran dan aturan keagamaan. Setyawan mengungkapkan bahwa aturan-aturan keagamaan dipenuhi dengan persyaratan “kenormalan,” yang dengan demikian mereka yang tidak termasuk dalam kategori “normal” dianggap tidak layak dalam kehidupan keberagamaan. Jabatan keimaman, termasuk imam besar, yang dapat dianggap sebagai puncak idealisasi dari kemanusiaan karena dianggap sebagai “yang suci,” atau “yang terpilih,” harus memenuhi semua syarat-syarat “kenormalan.”<sup>8</sup> Dengan demikian ideologi kenormalan dan juga kesempurnaan ini memandang bahwa para penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang di luar “kenormalan” atau “abnormal,” bahkan “cacat” yang mana memiliki bagian-bagian tubuh yang “tidak sempurna.” Maka itu, dalam pandangan ideologi kenormalan dan juga kesempurnaan, mereka perlu untuk “dinormalkan.”

## **BUKAN CHARITY, TAPI CARITAS**

Budaya “kenormalan” dan “kesempurnaan” yang hidup di dalam masyarakat mendukung akan keberlangsungan stigmatisasi negatif terhadap para penyandang disabilitas sebagai orang-orang dengan “kecacatan,” “ketidaknormalan,” dan “ketidaksempurnaan.” Akibatnya, mereka mendapat perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat yang kemudian berdampak pada kehidupan dan penghidupan mereka. Selain itu, ideologi “kenormalan” dan “kesempurnaan” itu juga membangun stereotip dalam masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang “cacat” yang tidak berdaya, perlu untuk dibelas-kasihani, ditolong dan disantuni. Secara tidak langsung pandangan “kenormalan” dan “kesempurnaan” yang ada di dalam masyarakat ini memandang para penyandang disabilitas ini sebagai “obyek,” bukan sebagai

“subyek”. Setyawan menyatakan bahwa “kenormalan” dengan demikian merupakan kekuasaan untuk menentukan pihak lain. “Kenormalan” adalah kekuatan untuk menjadikan pihak lain sebagai obyek.<sup>9</sup> Paradigma sebagai “obyek” ini justru semakin menempatkan para penyandang disabilitas pada posisi yang rendah di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pun memandang mereka bukan saja sebagai kelompok masyarakat yang “cacat” dan “abnormal”, tetapi juga sebagai orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu yang hanya bisa menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Pandangan ini semakin menyisihkan para penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang tidak dapat berkarya bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pada akhirnya, mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk memberdayakan diri untuk berkarya. Maka, tidak ada pilihan lain dalam hidupnya, selain menggantungkan diri mereka pada bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh negara.

Perlakuan sebagai obyek terhadap para penyandang disabilitas menempatkan mereka sebagai sasaran atau target oleh masyarakat sebagai pihak yang lemah dan perlu untuk disantuni. Tidak sedikit anggaran negara yang dialokasikan sebagai bantuan sosial untuk menyantuni para penyandang disabilitas. Demikian juga lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, termasuk gereja, juga mengakomodir segala sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan umat untuk menyalurkan sumbangan dan bantuan tersebut bagi para penyandang disabilitas. Segala bentuk sumbangan atau bantuan atau santunan bagi para penyandang disabilitas ini sangat bersifat *charity*, bukan *caritas*. *Charity* tetap sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pada waktu dan kondisi tertentu. Tidak cukup hanya *charity*, tapi *caritas* akan lebih dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dalam memaknai perbedaan *charity* dan *caritas*, Myroslaw Tataryn and Maria Truchan-Tataryn yang mengapresiasi kritik dari Paul K. Longmore terhadap aktivitas *charity* yang dilembagakan, mengatakan bahwa:

“Aktivitas *charity* yang mengakomodifikasi disabilitas adalah alat untuk meredakan rasa bersalah para kelas menengah ke atas atas konsumsi kepuasan diri yang berlebihan. Mekanisme pemberian ini memberikan terapi untuk keegoisan melalui “pameran” filantropi

yang ditujukan kepada kelompok masyarakat dengan disabilitas dan berjanji untuk mengubah (menjadi bukan disabilitas) karena sumbangan dari masyarakat yang sukses (kaya). Sebaliknya, caritas merespon dengan belas kasih atas kebutuhan yang setara, kurang memperhatikan diri sendiri daripada membantu orang lain. Mereka memperhatikan caritas pada gereja mula-mula dan dalam perkembangan monastisisme. *Caritas* menjangkau orang lain dengan kerendahan hati dan rasa hormat, memperhatikan martabat setiap manusia. *Caritas* menuntut kita untuk mengambil tanggung jawab individu atas interaksi kita dengan orang lain. *Caritas* berarti membuka diri kepada orang lain, bukan sebagai ahli atau professional, tetapi sebagai manusia yang penuh kasih kepada orang lain dengan sikap yang tulus kepada orang lain dengan harapan orang lain akan mendekati kita. Begitu kita dapat melampaui kecemasan kita, maka *caritas* itu membebaskan. Kekuatannya menaklukkan rasa takut kita dan mengantarkan kita ke dalam hubungan dengan potensi yang tidak terbatas di mana kita tidak hanya bertemu dengan diri kita sendiri, tetapi dalam proses pertemuan dengan Tuhan kita.”<sup>10</sup>

Lalu, mana yang lebih dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas? *Charity* atau *caritas*? Segala bentuk sumbangan dan bantuan sosial? Ataukah cinta-kasih yang terbuka dan tulus dalam relasi antar sesama? Upaya penghilangan paradigma para penyandang disabilitas bukan lagi sebagai obyek, melainkan subyek menjadi prioritas yang penting dikerjakan demi kemanusiaan mereka yang bermartabat selayaknya orang-orang yang bukan dengan disabilitas. Demikian juga pandangan tentang penyandang disabilitas sebagai sasaran segala bentuk sumbangan atau bantuan sosial. Pada dasarnya bahwa para penyandang disabilitas sendiri tidak ingin dibelas-kasihani dan juga disantuni layaknya orang yang tidak dapat bekerja dan berkarya. Mereka sebenarnya ingin diperlakukan selayaknya sama dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Mereka ingin dapat bekerja dan berkarya bagi dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan seorang pekerja dengan penyandang disabilitas fisik, yakni hanya memiliki satu kaki, di proyek bangunan Kantor Sinode GKMI (Gereja Kristen

Muria Indonesia). Ia mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu yang mengharuskan kaki kanannya harus diamputasi karena alasan kesehatan, yang mana kaki kirinya yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi. Setelah berbincang beberapa saat, saya memberanikan diri untuk bertanya: “Mengapa Bapak tetap mau bekerja meskipun dalam kondisi seperti ini? Apa ini tidak berat, Pak?” tanyaku. “Bisanya hanya bekerja seperti ini. Untuk hidup dan keluarga, Mas. Daripada mengemis.” jawabnya singkat. Atas jawaban tersebut, saya berpikir bahwa para penyandang disabilitas pada dasarnya ingin tetap bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri meskipun dalam kondisi yang terbatas. Mereka tidak ingin dipandang sebagai obyek yang dikasihani dan menjadi sasaran pemberian bantuan sosial. Mereka berharap untuk tetap memiliki kehidupan dan penghidupan yang layak seperti halnya orang lain pada umumnya. Saya berpendapat bahwa ketika mereka tetap mau bekerja dan berkarya meskipun dalam kondisi fisik yang terbatas, mereka menyadari bahwa mereka juga sama dengan orang lain yang bukan dengan disabilitas. Lebih dari itu, hidup mereka akan lebih berharga, baik di mata mereka sendiri maupun orang lain, ketika mereka dapat hidup secara mandiri dan bertanggung jawab pada diri dan keluarga mereka, bukan hanya sekedar menggantungkan pada uluran tangan orang lain. Penerimaan di dalam komunitas dan diberikannya kesempatan-kesempatan yang memberdayakan dirinya sehingga mereka mampu berkehidupan dan berpenghidupan sebagai manusia yang bermartabat akan jauh lebih berarti bagi para penyandang disabilitas.

## **MODEL SOLIDARITAS SEBAGAI COUNTER-ATTACK TERHADAP NORMALITAS**

Sekali lagi, pandangan normalitas atau kenormalan sebagai fenomena konstruksi sosial yang terbentuk dan hidup di dalam masyarakat benar-benar telah membingkai tatanan kehidupan manusia. Sebagai fenomena konstruksi sosial, kenormalan dapat membangun dinding yang tinggi dan tebal para penyandang disabilitas dari orang-orang yang bukan dengan disabilitas. Bagi orang-orang yang bukan dengan disabilitas, kenormalan akan membawa dan menempatkan mereka pada sikap yang eksklusif sebagai pihak superior. Sebaliknya, pandangan kenormalan ini menciptakan konsekuensi yang besar

bagi para penyandang disabilitas. Kenormalan memandang para penyandang disabilitas sebagai bentuk “kecacatan,” “ketidaknormalan” dan “ketidaksempurnaan” dalam diri manusia. Akibatnya, para penyandang disabilitas seringkali tereliminasi, terdiskriminasi, dan terpinggirkan di dalam tatanan masyarakat yang mengagungkan kenormalan dan juga kesempurnaan. Kenormalan juga menempatkan para penyandang disabilitas sebagai obyek, bukan subyek. Mereka dipandang sebagai kelompok inferior dan korban yang pasif di antara kelompok superior yang mengatasnamakan kenormalan. Untuk itu, kenormalan yang telah terbentuk menjadi suatu budaya perlu untuk dikritisi dalam keterkaitannya yang memarjinalkan para penyandang disabilitas dari masyarakat yang bukan menyandang disabilitas. Bagaimana? Mengcounter dengan penerapan model pendekatan disabilitas yang inklusif bagi penyandang disabilitas, yakni model solidaritas, bukan model moral, medis ataupun juga sosial.

Model moral menekankan bahwa disabilitas itu disebabkan oleh kesalahan moral atau dosa, kegagalan iman dan ujian iman. Disabilitas ini menyebabkan rasa malu bagi penyandang disabilitas dan juga keluarganya. Sedangkan model medis menggambarkan bahwa disabilitas itu disebabkan oleh kegagalan sistem tubuh yang secara inheren tidak normal dan bersifat patologis. Penyebabnya adalah adanya kelainan medis secara genetika, kebiasaan kesehatan yang buruk dan juga dari perilaku seseorang. Selanjutnya, menurut model sosial, bahwa disabilitas sebagai hasil konstruksi sosial. Dan yang menjadi permasalahannya berada di lingkungan yang tidak dapat mengakomodasi penyandang disabilitas. Dalam model ini masyarakat dianggap telah mengecewakan dan menindas para penyandang disabilitas.<sup>11</sup> Pendapat saya, bahwa dari ketiga model pendekatan tersebut tidak bisa mengcounter budaya kenormalan dan menjawab segala konsekuensi yang ditimbulkannya sebagai bentuk keberpihakannya terhadap para penyandang disabilitas. Model moral sebagai model pendekatan yang paling tua tentunya tidak dapat mengatasi budaya kenormalan karena hanya menitikkan disabilitas dalam diri manusia sebagai akibat dari kejahatan moral dan juga dosa. Model pendekatan ini tentunya sudah tidak relevan lagi pada konteks sekarang ini karena dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan sangat dipengaruhi nilai-nilai dogmatis agama. Sedangkan model medis tentunya akan mendukung pandangan kenormalan yang menganggap disabilitas merupakan

suatu bentuk “kecacatan” atau kelemahan, khususnya fisik, dalam diri manusia sehingga “kecacatan” atau kelemahan itu harus diperbaiki untuk dibuat menjadi normal. Menurut Gerald McKenny, model medis menekankan disabilitas sebagai suatu kondisi yang menghalangi para penyandang disabilitas untuk memenuhi fungsi kemanusiaan, menjalankan kapasitas kemanusiaan dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Dalam kalimat lain, disabilitas ini dipahami sebagai bentuk kelainan atau ketidakmampuan yang membuat orang dengan disabilitas tidak dapat mengerjakan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang bukan dengan penyandang disabilitas. Dalam model medis ini, berpandangan bahwa: *Pertama*, sebagian besar disabilitas tidak dapat disembuhkan, dan bahkan tidak dapat diobati secara efektif dengan obat-obatan yang ada pada saat ini. *Kedua*, memperlakukan para penyandang disabilitas sebagai penyakit. *Ketiga*, model medis ini menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang “abnormal”, sedangkan yang tidak menyandang disabilitas dianggap sebagai orang “normal”.<sup>12</sup> Selanjutnya, model sosial menunjukkan suatu kondisi ketidakmampuan bagi para penyandang disabilitas dalam menjalankan fungsi tertentu dan berpartisipasi penuh dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Bukan karena kedisabilitasannya itu, melainkan oleh karena kegagalan masyarakat dalam memandang dan mengakomodasi. Dengan kalimat lain, penderitaan yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas itu bukan disebabkan kedisabilitasannya itu, tetapi lebih karena cara pandang masyarakat yang salah dalam memahami kedisabilitasannya mereka.<sup>13</sup>

Model solidaritas menjadi salah satu model pendekatan yang memanusiakan kemanusiaan para penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat. Model Solidaritas ini mengambil bentuk konkret dari keramahtamahan atau persahabatan sehingga menekankan pada suatu upaya untuk meruntuhkan pemahaman dan perbedaan antara “kami-mereka” dan juga kata “normal-abnormal.” Model pendekatan ini berupaya untuk menghilangkan perbedaan kategoris antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas: baik itu dari sisi kapasitas fisik, afektif maupun juga kognitif. Menurut McKenny, meskipun model solidaritas ini dianggap sebagai model yang terbaik untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dari model medis dan sosial. Pada sisi lainnya, model ini mampu memasukkan aspek positif dan kedua model tersebut. Meskipun

model solidaritas ini sebagai model yang terbaik, model ini tetap perlu untuk mengakomodasi aspek-aspek positif, baik dari model medis maupun sosial.<sup>14</sup>

### **TIDAK ADA GEREJA YANG SEMPURNA, TUBUH KITA PUN TIDAK, DEMIKIAN JUGA TUBUH YESUS**

Apakah ada gereja yang sempurna di dunia ini? Tidak. Saya berpendapat bahwa tidak ada satu pun gereja di muka bumi ini yang sempurna. Mengapa? Karena kita dapat mengetahui bahwa dalam perjalanannya, gereja selalu diwarnai dengan konflik, pertikaian dan juga perpecahan di dalam tubuh gereja itu sendiri. Kekerasan dan peperangan pun juga menyertai sejarah perjalanan dan perkembangan gereja dari masa ke masa. Gereja seringkali juga menempatkan dirinya sebagai sumber kebenaran yang utama, yang kemudian memutlakkan kebenaran itu. Keberadaan gereja yang begitu mengabsolutkan kebenarannya sebagai kebenaran satu-satunya merupakan satu bentuk ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri gereja. Peristiwa reformasi gereja dengan segala akibat yang ditimbulkannya, yakni perselisihan, perpecahan, kekerasan, merupakan satu bentuk konkrit bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Konflik dan perpecahan seringkali terjadi dan selalu membayangi kehidupan bergereja. Hingga sampai dengan detik ini pun masih ada banyak sekali konflik, perselisihan dan juga perpecahan yang sedang terjadi di gereja-gereja, baik yang berada dalam internal gereja itu sendiri maupun dengan gereja lain, bahkan dengan agama dan kepercayaan lain. Konflik-konflik yang terjadi di dalam gereja seringkali tidak dapat terselesaikan, dan memiliki kecenderungan pada tindak kekerasan dan perpecahan antar jemaat maupun gereja satu dengan gereja yang lain. "There is no perfect church as there is no "perfect" body." [Tidak ada gereja yang sempurna sebagaimana tidak ada tubuh yang sempurna]. Demikian yang dikatakan oleh Nancy L. Eiesland mengenai gereja sebagai persekutuan.<sup>15</sup>

Meskipun tidak ada gereja yang sempurna, namun pada kenyataannya bahwa ada banyak ajaran dan aturan dalam kekristenan, khususnya di dalam Alkitab, yang menuntut syarat "kenormalan" sebagai wujud "kesempurnaan" dalam tubuh seseorang. Berikut ini pernyataan Setyawan atas "kenormalan" yang ada dalam teks-teks Alkitab:



“Aroma kuat dari budaya “kenormalan” terlihat dari setiap halaman teks-teks Alkitab, mulai dari teks-teks Perjanjian Pertama sampai Perjanjian Kedua. Nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim adalah orang-orang yang (harus) “normal.” Teks Alkitab memarjinalisasi ODD (orang dengan disabilitas) dalam kultus dan dalam masyarakat. Dalam studi yang dilakukan Olyan, sambil membedakan istilah *native* (misalnya, cacat) dan *nonnative* (yakni, *disable*), teks-teks dalam Perjanjian Pertama menggambarkan manusia yang sempurna sebagai yang tinggi, kulit cerah, tegap, kuat, ganteng, dll. Sedangkan manusia yang mengalami kecacatan digambarkan sebagai antara lain, timpang, buta, dan berpenyakit kulit, tetapi bisu dan tuli tidak dianggap cacat, karena tak terlihat kasat mata, namun tetap mengalami marjinalisasi. Dalam Perjanjian Kedua, Yesus sang Mesias digambarkan sebagai laki-laki “normal” tanpa cacat. “Kecacatan” adalah persoalan keagamaan dan kemasyarakatan yang sangat substansial. Penulis-penulis injil kanonis menegaskan bahwa orang-orang yang “cacat” perlu “dinormalkan.”<sup>16</sup>

Sebagai upaya merespon “kenormalan” yang ada dalam teks-teks Alkitab, Setyawan mengungkapkan bahwa walaupun teks-teks Alkitab yang ditulis dalam budaya patriarki yang menjunjung tinggi “kenormalan,” namun terdapat potensi untuk menjadikan teks-teks tersebut sebagai alat kritis menghadapi problem kemanusiaan dewasa ini. Dengan mengutip pemikiran dari Daniel Patte, Setyawan menyampaikan bahwa penafsiran harus dilakukan dalam dengan sikap etis untuk pendemonstrasian *accountability* maka proses tersebut juga harus dilakukan dengan sikap etis pendemonstrasian *responsibility*.<sup>17</sup> Tambah lagi, Setyawan menawarkan *reader-response criticism* sebagai salah satu alternatif hermeneutik. Dalam *reader-response criticism*, makna tidak ditemukan di belakang teks atau di dalam teks, melainkan di depan teks, yakni direkonstruksi oleh penafsir sendiri.<sup>18</sup>

Tidak ada gereja yang sempurna sebagaimana juga tidak ada tubuh yang sempurna, demikian juga dengan tubuh Yesus. Setelah kebangkitan-Nya, Yesus tidak memiliki tubuh yang sempurna seperti sebelumnya. Yesus yang tersalib dan yang kemudian bangkit memiliki banyak luka dan “kecacatan”

pada tubuh-Nya: tubuh yang tersayat dan terkoyak, darah yang tertumpah, tangan dan kaki yang berlubang. Narasi ketidaksempurnaan atau “kecacatan” tubuh Yesus setelah kebangkitannya ini tercatat dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Sinoptik. Nancy L. Eiesland menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang “cacat” yang mana kedua tangan dan kakinya yang “cacat” dan tertusuk pada sisi-Nya. Kristus yang bangkit menyempurnakan proklamasi inkarnasi bahwa Tuhan bersama dengan kita, yang diwujudkan seperti halnya diri kita, yang menggabungkan kepenuhan (kontingensi) manusia dan juga kehidupan biasa. Dalam menunjukkan tangan dan kakinya yang “cacat” kepada murid-murid-Nya yang terkejut, Yesus yang bangkit terungkap sebagai Tuhan yang “cacat”. Dengan begitu, Tuhan yang “cacat” itu juga mengungkapkan kemanusiaan yang baru. Tuhan yang “cacat” bukan hanya seorang yang dari sorga tetapi pemberitaan kepribadian yang sejati, menekankan realitas kepribadian yang penuh dengan pengalaman disabilitas.<sup>19</sup> Di sini Eiesland berupaya untuk mengembangkan kristologi kontekstual yang berbicara tentang inkarnasi Tuhan. Melalui ini ia menunjukkan pokok teologi Kristen, yakni kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kristus yang bangkit ini sangat jarang diakui sebagai Tuhan dengan tangan dan kaki serta tanda-tanda kerusakan fisik yang parah. Eiesland meyakini bahwa Kristus yang bangkit ini adalah Tuhan dengan disabilitas. Hal ini dimaksudkan oleh Eiesland untuk menentang konsepsi tentang kepribadian dan normalitas yang menuntut kesempurnaan fisik. Padahal Kristus yang bangkit penuh dengan luka-luka dan ketidaksempurnaan fisik.<sup>20</sup>

Lalu, bagaimana kita merespon atas keberadaan Yesus sebagai Tuhan yang tidak sempurna alias “cacat?” Sangat sulit untuk diterima pemahaman tentang gambar Tuhan yang “cacat” di tengah budaya dan ideologi “kenormalan.” Yesus yang seringkali dilihat dari sisi transenden sebagai Tuhan yang maha kuasa, maha tinggi, maha di atas segalanya harus dilihat sebagai Tuhan yang “cacat” atas luka-luka dari penyaliban. Pendapat saya bahwa Eiesland bertujuan untuk menyuarakan kepada gereja untuk menyadari diri mereka juga memiliki ketidaknormalan dan ketidaksempurnaan, seperti halnya di dalam diri Yesus setelah kebangkitan-Nya dari penyaliban dan kematian. Untuk itu, gereja perlu untuk memiliki gagasan dan nilai teologis yang baru tentang disabilitas dan merangkul para penyandang disabilitas. Hal ini sebagai langkah baru bagi gereja untuk dapat

melihat para penyandang disabilitas bukan dari segala “kecacatannya” dan ketidaksempurnaannya,” bukan sebagai obyek dan inferior yang pasif, serta untuk dikasihani, tetapi sebagai subyek yang aktif dan setara dalam kehidupan, termasuk juga dalam hal teologis. Eiesland mengemukakan gambar Tuhan yang merangkul semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Harapannya, bahwa semua orang akan mampu mengembangkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap para penyandang disabilitas, demikian gereja sebagai komunitas iman.

### **GEREJA SEBAGAI KOMUNITAS IMAN YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Di tengah ketidaksempurnaannya, gereja sebagai komunitas iman diharapkan memiliki sikap yang inklusif terhadap para penyandang disabilitas yang seringkali tersisihkan dari komunitasnya. Gereja sebagai komunitas iman yang membebaskan para penyandang disabilitas dari jerat besi “*kenormalan*” yang membelenggu dan menempatkan mereka sebagai masyarakat inferior. Disadari atau tidak, bahwa *kenormalan* telah menjadi dinding yang tebal dan tinggi yang memisahkan orang-orang dengan disabilitas dari orang-orang yang bukan dengan disabilitas. Di sinilah, gereja sebagai komunitas iman perlu memiliki sikap yang inklusif kepada semua orang, baik mereka yang bukan penyandang disabilitas maupun yang menyandang disabilitas. Sebagai komunitas iman yang inklusif, gereja perlu menjadi terbuka, menerima segala perbedaan yang ada dan tentunya mampu membangun relasi dengan yang berbeda-beda tersebut secara adil.

Dalam upaya membangun gereja sebagai komunitas iman yang inklusif penuh terhadap para penyandang disabilitas, Webb-Mitchell menekankan pada satu pemikiran yang melampaui aksesibilitas, yakni aksesibilitas ke dalam kehidupan komunitas iman, baik dari sisi “bangunannya”, programnya, maupun juga aktivitas-aktivitasnya di dalam komunitas tersebut, yang dikerjakan oleh dan bersama dengan para penyandang disabilitas.<sup>21</sup> Intinya adalah gereja sebagai komunitas iman selalu berupaya terbuka, dan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada, termasuk juga mereka yang menyandang disabilitas. Tanpa keterbukaan, penerimaan dan keterlibatan seluruh anggota, termasuk para penyandang disabilitas, upaya

menuju inklusi yang penuh dalam komunitas iman tidak akan dapat dicapai. Inilah gereja sebagai komunitas iman yang inklusif yang selalu mengupayakan hidup di dalam, di antara dan bersama dengan yang lain serta keberbedaannya di dalam tubuh Kristus dan juga kemurahan Roh Kudus untuk kebaikan bersama di dalam kehidupan bergereja.

Menurut Webb-Mitchell, bahwa proses menuju inklusi yang penuh dalam komunitas iman memerlukan pendidikan bersama untuk membangun tanggung-jawab pada masing-masing pribadi, dan juga yang lain di dalam komunitas itu; untuk menemukan apa dan siapa mereka; untuk mengembangkan sikap yang membentuk karunia, skill, dan pelayanan; serta mempergunakannya semua itu untuk kepentingan bersama dalam komunitas iman.<sup>22</sup> Bagi penyandang disabilitas, ini merupakan suatu tantangan pendidikan, penyusunan, pembentukan, atau penciptaan sebuah disiplin atau praktik oleh tubuh Kristus, yang mana ada penyandang disabilitas bersama dengan yang bukan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas dan program dalam komunitas iman. Para penyandang disabilitas dimungkinkan tidak berdiri sendiri, terpisah dari yang bukan disabilitas, tetapi bersama-sama dengan yang bukan disabilitas. Hal ini bertujuan untuk tidak memperlakukan penyandang disabilitas sebagai pelayanan khusus, termasuk dalam kehidupan bergereja. Kendala utama untuk menuju inklusi yang penuh bagi para penyandang disabilitas dalam kehidupan bergereja adalah berkenaan dengan cara kita mendidik semua anggota di dalam tubuh Kristus.

Gereja yang adalah seperti halnya “sekolah” perlu untuk memberikan pendidikan yang “humanizing”, bukan “dehumanizing”, yaitu dengan menghubungkan antara kehidupan pribadi dengan pengetahuan dalam kehidupan mereka, bukan hanya berfokus pada intelektual atau kognitif saja. Demikian juga, dalam kehidupan bergereja sebagai sekolahan yang seringkali hanya berfokus pada apa yang secara teologis kita ketahui sebagai aktivitas intelektual saja, daripada berbagi visi yang sama dari pendidikan sebagai aktivitas yang melibatkan pikiran, tubuh, dan jiwa seseorang dalam mempelajari dan mempraktekkan suatu seni yang baik satu dengan yang lain dalam komunitas Kristen. Perlu untuk diketahui bahwa pendekatan intelektual untuk pendidikan Kristen tidak akan pernah inklusif. Mengapa? Karena pada dasarnya ini didasarkan pada ketrampilan bahasa dan kognitif, keterampilan yang tidak mungkin dimiliki oleh semua orang,

khususnya orang dengan disabilitas mental. Untuk itu, Webb-Mitchell mengajak kita untuk menggambarkan kembali pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus, yakni kita tetap perlu berada di dalam dan ikut serta dalam karya kasih yang unik untuk tubuh Kristus yang telah bangkit, karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Pendidikan dalam tubuh Kristus, mengingat kebenaran itu didasarkan pada dirinya sendiri, yang haruslah inklusif. Di sini kita diharuskan untuk memiliki stamina karakter untuk melakukan gerak tubuh Kristus yang memandang dunia ini sebagai ciptaan Tuhan, dan mendengarkan Injil sebagaimana Kristus telah hadir di antara kita.<sup>23</sup>

Gereja sebagai komunitas iman yang inklusif, maka, gereja itu mampu untuk menghadirkan Pendidikan Kristiani Inklusi dalam kehidupan bergereja, yakni sebagai Pendidikan Kristiani yang menginklusi para penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bergereja, keluarga, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog antara Pendidikan Kristiani dengan pendidikan inklusi dan teologi disabilitas, agar dapat terwujud Pendidikan Kristiani Inklusi, yang mana adalah perjumpaan dari tiga komponen, yakni teologi disabilitas, pendidikan inklusi dan pendidikan Kristiani.<sup>24</sup> Kita perlu untuk menyerukan kembali bahwa kita adalah gereja sebagai tubuh Kristus, dan juga kita memerlukan hukum kasih dalam upaya menerapkan inklusifitas. Sangat penting untuk belajar dan mempelajari lagi praktek cinta-kasih dalam proses mempraktikkan inklusi bersama di dalam komunitas iman, termasuk dengan mereka yang menyandang disabilitas.

## **GEREJA SEBAGAI AGEN PEMBEBAS YANG MEMBERDAYAKAN PENYANDANG DISABILITAS: BALAI KARYA “BERKAT” GKMI SEMARANG**

Josef Purnama Widyatmadja mengatakan bahwa mengikuti Yesus berarti harus mengenal dan menghayati visi Yesus. Seluruh pengajaran dan perbuatan Yesus selalu menunjuk pada Kerajaan Allah atau kerajaan surga yang telah, sedang, dan akan datang. Di dalam ajaran tentang pemenuhan Kerajaan Allah yang akan datang, kita menemukan visi pelayanan Yesus. Seluruh ajaran, tindakan, dan sikap Yesus selalu mengarah pada terpenuhinya kedatangan Kerajaan Allah (Luk. 7:20-23). Tambah lagi, Allah yang kita

kenal dalam Yesus Kristus melakukan misi di tengah dunia. Dalam mencapai tujuan penyelamatan, Allah memakai manusia (umat Allah) untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kalau orang beriman melaksanakan misi, apa yang dikerjakan adalah misi Allah, bukan misi manusia atau agama. Pada dasarnya, misi Allah adalah satu, yaitu untuk mencapai pemenuhan Kerajaan Allah. Dengan demikian, misi yang dilakukan orang beriman sebagai rekan sekerja Allah adalah mewujudkan karya keselamatan dari Allah.<sup>25</sup> Sebagai rekan sekerja Allah, gereja diharapkan mampu untuk mengerjakan misi Kerajaan Allah yang pernah dilakukan oleh Yesus bersama dengan para murid-Nya atas penindasan, diskriminasi sosial, dan segala bentuk tindak ketidakadilan di masyarakat.

Gereja dipanggil ke dunia untuk menyuarakan dan mengerjakan tugas profetik untuk merespon segala bentuk tindak ketidakadilan yang terjadi di dunia. Gereja dipanggil untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dalam kuk ketidakadilan yang mendiskriminasi dan memiskinkan. Bagaimana sikap gereja dalam merespon panggilan Allah untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus? Apakah gereja berani mengambil peran seperti yang Yesus telah kerjakan di dunia? Widyatmadja mengemukakan pentingnya spiritualitas pembebasan bagi gereja, yakni sebuah spiritualitas yang bisa memberdayakan orang yang terlibat dalam perjuangan untuk kebebasan. Tanpa spiritualitas pembebasan, seseorang tidak mungkin bertahan hidup dalam perjuangan pembebasan. Perubahan yang terjadi dalam diakonia transformatif merupakan pembebasan dari belenggu ketidakadilan. Oleh sebab itu, spiritualitas diakonia transformatif di sini tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas pembebasan atau pemerdekaan.<sup>26</sup> Spiritualitas pembebasan mengupayakan adanya bentuk pemberdayaan kepada mereka yang tidak berdaya karena ketidakadaan dan pembatasan kesempatan-kesempatan bagi mereka. Melalui pemberdayaan diharapkan akan memberikan dampak pada perubahan pemikiran dan perilaku dalam kehidupan mereka. Dengan demikian mereka yang akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari ketidakberdayaannya, sehingga mereka mampu hidup secara mandiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain.

Gereja dengan spiritualitas pembebasannya perlu untuk menjangkau para penyandang disabilitas. Gereja sebagai agen pembebasan dibutuhkan

untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Di sinilah gereja berupaya untuk membangun relasi dan komunitas bagi mereka serta sekaligus untuk memberdayakan mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Gereja menjadi komunitas yang memberdayakan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kerja yang dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas. Melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang diberikan diharapkan dapat membekali para penyandang disabilitas menjadi berdaya dan berdampak pada kehidupan mereka dan komunitasnya. Dengan demikian gereja mampu menjadi agen pembebas dan pemberdaya bagi mereka yang membutuhkan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh gereja ini menjadi satu proses memanusiakan manusia yang tersisih. Berikut ini adalah salah satu contoh pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas yang dilakukan oleh gereja.

Peresmian gedung Balai Karya “Berkat” GKMI Semarang yang berlokasi di Jalan Raya Kopeng Km.7, Kabupaten Semarang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017.<sup>27</sup> Kurang lebih sebulan setelah peresmian itu, kegiatan pelayanan dan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas baru dimulai, yakni pada sekitar awal September 2017. Sebenarnya, kegiatan pelayanan dan pemberdayaan Balai Karya “Berkat” ini telah dimulai sejak tanggal 1 September 2013 di bawah koordinasi Komisi Komunitas Berkebutuhan Khusus (Komisi KBK) GKMI Semarang. Adapun tujuan didirikan Balai Karya “Berkat” ini adalah untuk memberdayakan komunitas berkebutuhan khusus pasca sekolah sehingga mereka dapat berkarya dan bekerja dalam keterbatasan yang dimiliki oleh mereka. Beberapa kegiatan pelayanan keterampilan dan pemberdayaan yang diberikan sesuai dengan minat para penyandang disabilitas pada waktu itu adalah pelatihan menyulam, pembuatan tusuk sate, pembuatan krupuk dan bawang goreng, penjualan pulsa dan juga membuat batik. Hasil dari pelatihan keterampilan tersebut dikelola dan dipasarkan oleh Komisi KBK GKMI Semarang melalui event-event khusus di GKMI Semarang dan lainnya.

Selanjutnya, setelah memiliki dan menempati gedung baru di daerah Kopeng-Salatiga, Balai Karya “Berkat” ini dikelola langsung oleh Pdt. Em. Yeanny Moestika Soeryo, yang mana beliau juga telah menyelesaikan tanggung jawab penggembalaan jemaat di GKMI Semarang. Beliau menyampaikan bahwa Balai Karya “Berkat” yang dibangun ini atas dasar kepedulian Yesus yang tidak memandang kondisi fisik maupun mental

seseorang. Balai Karya ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi para penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan-keterampilan dalam keterbatasannya. Setelah memiliki dan menempati gedung baru, pelatihan-pelatihan keterampilan dan pemberdayaan itu berkembang, diantaranya adalah pelatihan potong rambut untuk pria dan wanita, menjahit, serta keterampilan memainkan alat musik gitar, cajon dan juga ukulele. Pelatihan keterampilan-keterampilan sebagai pemberdayaan bagi penyandang disabilitas diberikan secara gratis, tanpa ada pungutan biaya sepeserpun. Dan untuk mendukung kegiatan pelayanan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas dan biaya operasional Balai Karya “Berkat” pada awalnya berasal dari gereja dan donasi lainnya, termasuk juga hasil penjualan produk-produk ketrampilan para penyandang disabilitas. Balai Karya “Berkat” pada saat ini memiliki rumah makan, menjual aneka jus buah kemasan, susu sapi segar serta juga penginapan untuk kegiatan retreat. Di mana hasilnya digunakan juga untuk dana operasional di Balai Karya Berkat.

Para penyandang disabilitas yang telah selesai mendapat pelatihan keterampilan kerja dan dianggap telah mampu untuk berkarya, mereka diberikan kebebasan untuk berkarya secara mandiri menurut minat, bakat dan ketrampilan yang dimiliki. Atas pelayanan dan pemberdayaan yang dilakukan bagi para penyandang disabilitas, pemerintah Kabupaten Semarang melalui perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Semarang, sangat mengapresiasi atas visi dan misi yang diemban oleh Balai Karya “Berkat” dalam memperhatikan para penyandang disabilitas. Ini merupakan sebuah upaya yang sangat baik untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas.

## **PENUTUP**

Kenormalan telah tumbuh dan mengakar dengan sangat kuat dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, para penyandang disabilitas semakin tereliminasi, terdiskriminasi dan terpinggirkan di tengah masyarakat yang mengagungkan kenormalan dan kesempurnaan. Model pendekatan solidaritas menjadi alternatif sebagai counter-attack atas kedigdayaan kenormalan yang telah hidup dalam masyarakat. Di tengah ketidaksempurnaannya, gereja sebagai komunitas iman diharapkan memiliki



solidaritas dan sikap inklusif serta mau berpartisipasi dalam memberdayakan para penyandang disabilitas yang terpinggirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Eiesland, Nancy L. *The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability*. Nashville: Abingdon Press, 1994.

Tataryn, Myroslaw dan Maria Truchan-Tataryn. *Discovering Trinity in Disability: a Theology for Embracing Difference*. Maryknoll: Orbis Books, 2013.

Webb-Mitchell, Brett. *Beyond Accessibility: Toward Full Inclusion of People with Disabilities in Faith Communities*. New York: Church Publishing, 2010.

### **Jurnal dan Makalah:**

McKenny, Gerald. "Disability and the Christian Ethics of Solidarity." *Fu Jen International Religious Studies* Vol.6.1 (N. Summer 2012).

Olkin, Rodha, 2002. "Could You Hold the Door for Me? Including Disability in Diversity." In Educational Publishing Foundation. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*. Vol. 8, No. 2

Setiawan, Yusak. "Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas: Menuju Hermeneutik Disabilitas," dalam *Prosiding Seminar dan Lokakarya Diskursus Difabilitas dalam Pendidikan Teologi di Indonesia*. PERSETIA, Salatiga, 22-26 Juli 2013.

### **Majalah:**

Ryan, Mark. "Yesus Memedulikan Semua Orang: Peresmian Gedung Balai Karya "Berkat" GKMI Semarang". beritaGKMI. Semarang. Oktober 2017.

### Sumber lain:

Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN), 2003. *A Church of All and for All*. Geneva: WCC Publications.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>2</sup> Brett Webb-Mitchell, *Beyond Accessibility: Toward Full Inclusion of People with Disabilities in Faith Communities*, (New York: Church Publishing, 2010) halaman 133

<sup>3</sup> Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN), 2003. *A Church of All and for All*. Geneva: WCC Publications.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>6</sup> United Nations. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 2006. Terjemahan Bahasa Indonesia: Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

<sup>7</sup> Yusak B. Setyawan, "Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas: Menuju Hermeneutik Disabilitas," dalam *Prosiding Seminar dan Lokakarya Diskursus Difabilitas dalam Pendidikan Teologi di Indonesia*. PERSETIA, Salatiga, 22-26 Juli 2013.

<sup>8</sup> Yusak B. Setyawan "Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas: Menuju Hermeneutik Disabilitas," dalam *Prosiding Seminar dan Lokakarya Diskursus Difabilitas dalam Pendidikan Teologi di Indonesia*. PERSETIA, Salatiga, 22-26 Juli 2013.

<sup>9</sup> Yusak B. Setyawan, "Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas: Menuju Hermeneutik Disabilitas," dalam *Prosiding Seminar dan Lokakarya Diskursus Difabilitas dalam Pendidikan Teologi di Indonesia*. PERSETIA, Salatiga, 22-26 Juli 2013.

<sup>10</sup> Myroslaw Tataryn and Maria Truchan-Tataryn, *Discovering Trinity in Disability: A Theology for Embracing Difference*, (Maryknoll: Orbis Books, 2013) halaman 118

<sup>11</sup> Rhoda Olkin, "Could You Hold the Door for Me? Including Disability in Diversity". *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology* Vol. 8, No. 2, the Educational Publishing, 2002, halaman 133

<sup>12</sup> Gerald McKenny, "Disability and the Christian Ethics of Solidarity". *Fu Jen International Religious Studies* Vol. 6.1, N. Summer, 2012, halaman 3-4

<sup>13</sup> Gerald McKenny, "Disability and the Christian Ethics of Solidarity". *Fu Jen International Religious Studies* Vol. 6.1, N. Summer, 2012, halaman 4-8

---

<sup>14</sup> Gerald McKenny, "Disability and the Christian Ethics of Solidarity". *Fu Jen International Religious Studies* Vol. 6.1, N. Summer, 2012, halaman 8-14

<sup>15</sup> Nancy L. Eiesland, *The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability*, (Nashville: Abingdon Press, 1994) halaman 108

<sup>16</sup> Yusak B. Setyawan, "Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas: Menuju Hermeneutik Disabilitas," dalam *Prosiding Seminar dan Lokakarya Diskursus Difabilitas dalam Pendidikan Teologi di Indonesia*. PERSETIA, Salatiga, 22-26 Juli 2013. 6

<sup>17</sup> Yusak B. Setyawan, "Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas: Menuju Hermeneutik Disabilitas," dalam *Prosiding Seminar dan Lokakarya Diskursus Difabilitas dalam Pendidikan Teologi di Indonesia*. PERSETIA, Salatiga, 22-26 Juli 2013. 7-11

<sup>18</sup> Yusak B. Setyawan, "Membaca Alkitab dalam Perspektif Disabilitas: Menuju Hermeneutik Disabilitas," dalam *Prosiding Seminar dan Lokakarya Diskursus Difabilitas dalam Pendidikan Teologi di Indonesia*. PERSETIA, Salatiga, 22-26 Juli 2013. 12

<sup>19</sup> Nancy L. Eiesland, *The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability*, (Nashville: Abingdon Press, 1994) halaman 100

<sup>20</sup> Nancy L. Eiesland, *The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability*, (Nashville: Abingdon Press, 1994) halaman 98-99

<sup>21</sup> Brett Webb-Mitchell, *Beyond Accessibility: Toward Full Inclusion of People with Disabilities in Faith Communities*, (New York: Church Publishing, 2010) halaman 113

<sup>22</sup> Brett Webb-Mitchell, *Beyond Accessibility: Toward Full Inclusion of People with Disabilities in Faith Communities*, (New York: Church Publishing, 2010) halaman 116

<sup>23</sup> Brett Webb-Mitchell, *Beyond Accessibility: Toward Full Inclusion of People with Disabilities in Faith Communities*, (New York: Church Publishing, 2010) halaman 130

<sup>24</sup> Tabita Kartika Christiani, *Pendidikan Kristiani Inklusi dalam Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Kristiani untuk Memperingati 100 Tahun Clement Suleman: Mendidik Dalam Kasih, Keadilan, & Kebenaran*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, 2019), halaman 15-16

<sup>25</sup> Josef P. Widyatmadja, *Yesus & Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010) halaman 126-127

<sup>26</sup> Josef P. Widyatmadja, *Yesus & Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010) halaman 121-122

<sup>27</sup> Mark Ryan, "Yesus Memedulikan Semua Orang: Peresmian Gedung Balai Karya "Berkat" GKMI Semarang" beritaGKMI, Semarang, Oktober 2017